

ANALISIS LAPORAN REALISASI ANGGARAN PADA PEMERINTAH KOTA SURABAYA

Arinda Lovierly Yunhardini

arindalovierly@gmail.com

Nur Handayani

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research determines the level of Government success in spending public funds efficiently and effectively in the Surabaya Government. Furthermore, the research evaluates the level of efficiency and effectiveness of the budget management of the Surabaya Government during 2021-2023. The study applies a descriptive-qualitative approach. The data were in the form of the Surabaya Budget Realization Report during 2021-2023. Moreover, they were gained from the official website of the BPKAD of the Surabaya Government. The instruments in the data analysis technique were observation, interviews, and documents. The data analysis technique involves collecting, reducing, presenting, and analyzing data. The result concludes that: (1) The Local budget efficiency ratio shows a fair efficiency category (80%-90%), but there is a remaining budget that is big enough each year. It indicates that there is inefficiency potential in planning and implementation, which is caused by some factors such as complex transfer fund regulations, lack of local cash, and problems in the procurement of goods/services, and (2) the effectiveness ratio of local revenue is ineffective (above 90%), with good support of planning and clear performance indicators. However, the revenue realization is not worth the target inclination, and the efficiency handicap can affect the program's achievement. Budget integration with the BAPPEKO development plan can become a strategic step in strengthening budget effectiveness.

Keywords : budget realization report, efficiency, and effectiveness

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pemerintah dalam penggunaan dana publik secara efisien dan efektif pada Pemerintah Kota Surabaya. Penelitian ini mengevaluasi tingkat efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran Pemerintah Kota Surabaya selama periode 2021-2023. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Data yang digunakan adalah Laporan Realisasi Anggaran Kota Surabaya tahun 2021 - 2023. Sumber data diperoleh dari web resmi BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Pemerintah Kota Surabaya. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data serta analisis data. Hasil penelitian menunjukkan : (1) Rasio Efisiensi belanja daerah berada menunjukkan dalam kategori cukup efisien (80%-90%), namun masih terdapat sisa anggaran yang cukup besar setiap tahun. Hal ini mengindikasikan adanya potensi inefisiensi dalam perencanaan dan pelaksanaan, yang disebabkan oleh berbagai faktor, seperti regulasi dana transfer yang kompleks, keterbatasan kas daerah, dan kendala dalam pengadaan barang/jasa. (2) Rasio Efektivitas penerimaan daerah juga berada dalam kategori efektif (di atas 90%), dengan dukungan perencanaan yang baik dan indikator kinerja yang jelas. Namun, realisasi pendapatan tidak sebanding dengan peningkatan target, dan hambatan efisiensi dapat memengaruhi pencapaian program. Integrasi belanja dengan Development Plan Bappeko menjadi langkah strategis untuk memperkuat efektivitas anggaran.

Kata Kunci : Laporan Realisasi Anggaran, Efisiensi, Efektivitas

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan daerah merupakan aspek krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama sejak diberlakukannya otonomi daerah yang memberi kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur urusan keuangannya sendiri. Berdasarkan

Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, pengelolaan keuangan daerah meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, hingga pengawasan. Salah satu bentuk implementasinya adalah penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang bertujuan mendukung program pembangunan serta pelayanan publik.

Dalam konteks sektor publik, anggaran tidak hanya berfungsi sebagai instrumen perencanaan keuangan, tetapi juga sebagai alat akuntabilitas atas pengelolaan dana publik (Mardiasmo, 2004). Penganggaran harus memperhatikan prinsip efektivitas, efisiensi, dan ekonomis, agar tidak hanya sebatas formalitas perencanaan, tetapi mampu menghasilkan dampak pembangunan yang nyata. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan permasalahan terkait pola penyerapan anggaran yang tidak ideal, terutama akumulasi belanja yang cenderung menumpuk di akhir tahun anggaran. Pola ini berisiko menurunkan kualitas pelaksanaan program dan berpotensi menghambat multiplier effect yang seharusnya mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menjadi alat penting dalam menilai seberapa jauh perencanaan anggaran telah terealisasi secara nyata. Ketidaksihesuaian antara alokasi anggaran dan realisasinya bisa menunjukkan adanya permasalahan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan anggaran. Oleh karena itu, analisis terhadap LRA penting dilakukan guna menilai efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran publik.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah (1) Apakah dana publik yang dikelola oleh Pemerintah Kota Surabaya telah digunakan secara efisien dan sesuai dengan peruntukannya?, (2) Bagaimana efektivitas penggunaan dana dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah direncanakan pada Pemerintah Kota Surabaya?

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui tingkat keberhasilan pemerintah dalam penggunaan dana publik secara efisien dan efektif pada Pemerintah Kota Surabaya.

TINJAUAN TEORITIS

Akuntansi Sektor Publik

Menurut (Halim, 2012) Akuntansi sektor publik adalah proses pencatatan, pengklasifikasian, analisis, dan pelaporan transaksi keuangan pada entitas publik, seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya. Tujuan utama dari akuntansi sektor publik adalah menyediakan informasi keuangan yang akuntabel dan transparan, yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan, pengendalian anggaran, dan evaluasi kinerja organisasi publik.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang mencerminkan sumber pendapatan dan alokasi belanja untuk kegiatan pembangunan dalam satu tahun anggaran. Menurut UU No. 33 Tahun 2004, APBD ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah dan berfungsi sebagai instrumen perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja pemerintah daerah. APBD terdiri dari tiga komponen utama, yaitu pendapatan (PAD, dana perimbangan, dan pendapatan sah lainnya), belanja (belanja langsung dan tidak langsung), serta pembiayaan.

Prosedur Penyusunan Anggaran

Menurut Nafarin (2004) Penyusunan anggaran daerah mengikuti beberapa tahapan, yaitu penetapan pedoman perencanaan, penyusunan rencana kerja dan anggaran oleh OPD, pembahasan dan penyusunan Rancangan APBD (RAPBD), hingga penetapan menjadi Perda. Proses ini melibatkan eksekutif (Wali Kota, BPKAD, Bappeda, SKPD) dan legislatif (DPRD).

Menurut Harahap (2000), terdapat tiga pendekatan dalam penyusunan anggaran organisasi, yaitu: top-down budgeting, di mana anggaran disusun dari pimpinan ke bawahan; bottom-up budgeting, yang disusun dari bawahan ke atasan; serta metode gabungan yang mengintegrasikan kedua pendekatan tersebut.

Pengukuran Efisiensi

Menurut Halim (2012) Efisiensi mencerminkan kemampuan suatu entitas dalam memanfaatkan sumber daya secara optimal untuk menghasilkan output yang diinginkan. Dalam konteks Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), efisiensi diukur melalui perbandingan antara realisasi belanja dan anggaran yang telah direncanakan. Semakin kecil selisih antara keduanya, semakin tinggi tingkat efisiensi yang dicapai. Tingkat efisiensi yang tinggi mengindikasikan bahwa penggunaan anggaran dilakukan secara hemat dan tepat sasaran.

Pengukuran Efektivitas

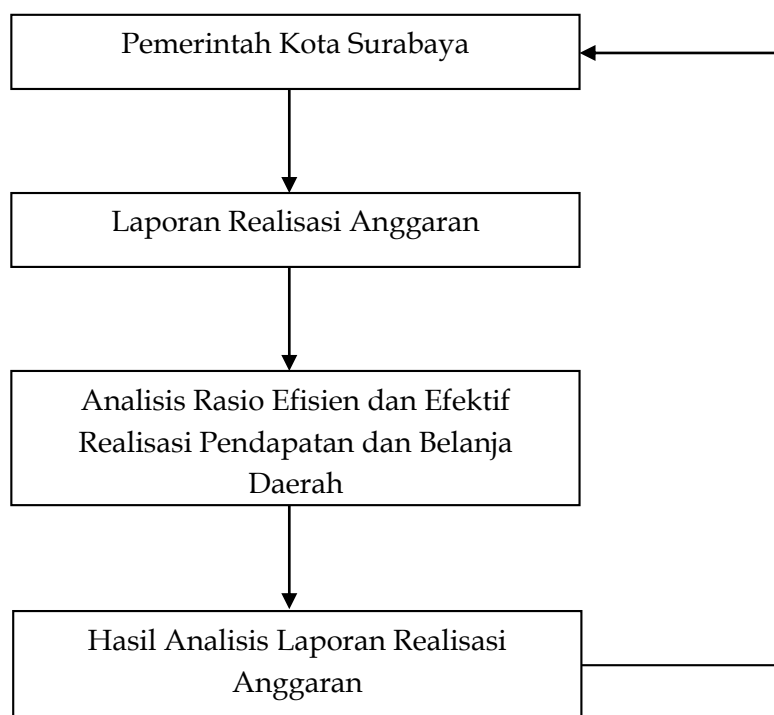
Menurut Halim (2012) Efektivitas adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan. Dalam pengelolaan keuangan daerah, efektivitas diukur berdasarkan capaian pendapatan terhadap target yang ditetapkan dalam APBD. Semakin besar persentase realisasi terhadap target, semakin efektif kinerja penerimaan daerah.

Anggaran Belanja Daerah

Anggaran belanja merupakan rencana pengeluaran yang disusun oleh pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan dan penyediaan layanan publik. Komponen belanja daerah umumnya diklasifikasikan menjadi belanja langsung, yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, serta belanja tidak langsung seperti gaji, subsidi, dan hibah. Menurut Mardiasmo (2004), anggaran ini dirancang agar dana yang diperoleh melalui pendapatan negara atau daerah dapat dialokasikan dan dimanfaatkan secara optimal untuk mencapai tujuan pembangunan, seperti pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan pelayanan publik lainnya. Anggaran belanja juga berfungsi untuk memastikan bahwa pengeluaran pemerintah sesuai dengan prioritas pembangunan, sehingga setiap dana yang dikeluarkan memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

RERANGKA KONSEPTUAL

Dalam penelitian ini tidak menggunakan hipotesis melainkan menganalisis, mengevaluasi, menyimpulkan serta memberikan masukan dan saran pada Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Surabaya. Untuk memperjelas konsep dan arah penelitian, maka peneliti membuat kerangka konsep sebagai berikut:



Gambar 1
Rerangka Pemikiran

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran Objek Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menguraikan secara sistematis kondisi dan proses yang terjadi dalam pengelolaan anggaran di Pemerintah Kota Surabaya, khususnya melalui analisis terhadap Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Menurut Usman dan Akbar (2009), pendekatan ini bertujuan untuk memahami perilaku dan respon narasumber berdasarkan latar belakang sosial mereka dengan menggunakan teknik observasi, wawancara terstruktur, dan dokumentasi.

Sumber Data

Sumber data merupakan elemen penting dalam penelitian karena membantu peneliti dalam memahami dan menganalisis permasalahan yang dikaji. Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari informan melalui wawancara mendalam dengan Kepala Tim Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Surabaya. Proses wawancara didukung oleh alat bantu seperti perekam suara dan dokumentasi sebagai langkah antisipatif untuk memastikan semua informasi terekam dengan baik dan dapat diverifikasi. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen yang telah tersedia sebelumnya. Menurut Sugiyono (2017), data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh pihak lain namun tetap relevan dan dapat digunakan oleh peneliti. Dalam konteks penelitian ini, data sekunder yang dianalisis adalah Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Surabaya tahun 2021-2023 yang telah di audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian kualitatif ini peneliti menggunakan instrumen untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan secara akurat dan valid. Dalam penelitian Analisis Laporan Realisasi Anggaran Pada Pemerintah Kota Surabaya, peneliti berperan penuh sebagai

observer sekaligus sebagai pewawancara, dengan melakukan wawancara dengan pejabat pada Dinas Keuangan, dan unit kerja lainnya yang terlibat dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran. serta mencatat seluruh kejadian, data dan informasi dari informan yang akan digunakan sebagai bahan analisis data.

Satuan Kajian

Satuan kajian bertujuan untuk memberikan pengarahan kepada peneliti dalam melakukan penelitian, maka disusun definisi konsep yang akan digunakan sebagai pedoman dalam melakukan penelitian yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan keuangan yang mencatat realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan pemerintah selama periode tertentu dan dituangkan dalam bentuk angka, biasanya satuan uang. LRA digunakan untuk mengevaluasi kinerja keuangan, memastikan efisiensi penggunaan anggaran, dan mendukung akuntabilitas keuangan pemerintah.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dengan menganalisis berdasarkan hasil observasi, wawancara, dokumentasi data yang sudah tersedia di lokasi penelitian berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pemerintah Kota Surabaya dari tahun-tahun sebelumnya. Lokasi penelitian berlokasi di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Surabaya.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan laporan keuangan yang menampilkan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan, yang dibandingkan dengan anggarannya dalam suatu periode tertentu, umumnya satu tahun anggaran. LRA memberikan gambaran mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi pemerintah dalam melaksanakan anggaran yang telah direncanakan.

Tabel 1
Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2021

Uraian	Jumlah (rupiah)	
	Anggaran	Realisasi
Pendapatan	8.675.008.247.134,00	8.326.878.076.226,29
Pendapatan Asli Daerah	5.322.810.142.550,00	4.727.280.629.669,00
Pendapatan Transfer	2.986.875.924.098,00	3.218.952.114.659,00
Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	365.322.180.486,00	380.645.331.897,29
Belanja	8.981.620.825.377,00	7.819.077.321.545,57
Belanja Operasi	7.550.834.552.911,00	6.771.433.976.328,20
Belanja Modal	1.393.552.677.405,00	1.016.336.503.390,00
Belanja Tidak Terduga	34.178.160.389,00	28.251.407.155,37
Transfer	3.055.434.672,00	3.055.434.672,00
Pembiayaan	306.612.578.243,00	316.623.750.966,77
Penerimaan Daerah	316.612.578.243,00	316.623.750.966,77
Pengeluaran Daerah	10.000.000.000,00	-

Sumber: Hasil Olahan Peneliti

Pada tahun 2021, realisasi pendapatan daerah mencapai Rp8.326.878.076.226,29, yang terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah, namun lebih rendah dari target anggaran sebesar Rp8.675.008.247.134,00. Realisasi belanja sebesar Rp7.819.077.321.545,57, yang mencakup belanja operasi, belanja modal, belanja tak

terduga, dan transfer, juga lebih rendah dibandingkan anggaran yang ditetapkan sebesar Rp8.981.620.825.377,00. Sementara itu, realisasi pembiayaan tercatat sebesar Rp316.623.750.966,77, sedikit lebih tinggi dari target anggaran Rp306.612.578.243,00, yang seluruhnya berasal dari penerimaan pembiayaan daerah tanpa adanya realisasi pengeluaran pembiayaan.

Tabel 2
Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2022

URAIAN	JUMLAH (Rupiah)	
	ANGGARAN	REALISASI
Pendapatan	9.822.403.087.674,00	8.791.308.679.482,20
Pendapatan Asli Daerah	6.316.345.973.654,00	5.314.695.257.794,40
Pendapatan Transfer	2.481.188.655.000,00	3.476.613.421.687,00
Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	-	-
Belanja	10.636.827.593.321,00	9.448.236.778.683,50
Belanja Operasi	8.625.723.584.781,00	7.679.441.144.733,50
Belanja Modal	1.998.526.419.610,00	1.766.030.466.528,00
Belanja Tidak Terduga	11.015.000.000,00	1.702.578.492,00
Transfer	1.562.588.930,00	1.062.588.930,00
Pembiayaan	814.424.505.647,00	814.437.505.647,49
Penerimaan Daerah	824.424.505.647,00	824.437.505.647,49
Pengeluaran Daerah	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00

Sumber: Hasil Olahan Peneliti

Pada tahun 2022, realisasi pendapatan daerah sebesar Rp8.791.308.679.482,20, yang terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah, tercatat lebih rendah dari target anggaran sebesar Rp9.822.403.087.674,00. Realisasi belanja mencapai Rp9.448.236.778.683,50, yang mencakup belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, dan transfer, juga lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp10.636.827.593.321,00. Sementara itu, realisasi pembiayaan sebesar Rp814.437.505.647,49 sedikit lebih tinggi dari target Rp814.424.505.647,00, dengan penerimaan pembiayaan sebesar Rp824.437.505.647,49 dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp10.000.000.000,00.

Tabel 3
Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023

URAIAN	JUMLAH (Rupiah)	
	ANGGARAN	REALISASI
Pendapatan	10.723.824.846.149,00	9.604.779.764.405,37
Pendapatan Asli Daerah	6.592.424.318.658,00	5.771.818.531.452,64
Pendapatan Transfer	4.131.400.527.491,00	3.832.961.233.952,73
Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	-	-
Belanja	10.821.334.252.595,00	9.543.590.902.934,50
Belanja Operasi	8.760.559.740.322,00	7.858.879.310.450,50
Belanja Modal	2.026.075.212.273,00	1.671.895.816.185,00
Belanja Tidak Terduga	33.449.300.000,00	12.815.776.299,00
Transfer	1.250.000.000,00	-
Pembiayaan	97.509.406.446,00	146.690.767.646,19
Penerimaan Daerah	157.509.406.446,00	156.690.767.646,19
Pengeluaran Daerah	60.000.000.000,00	1156.690.767.646,19

Sumber: Hasil Olahan Peneliti

Pada tahun 2023, realisasi pendapatan daerah sebesar Rp9.604.779.764.405,37, yang terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah, tercatat lebih rendah dari target anggaran sebesar Rp10.723.824.846.149,00. Realisasi belanja mencapai Rp9.543.590.902.934,50, yang mencakup belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, dan transfer, juga lebih rendah dari target anggaran sebesar Rp10.821.334.252.595,00. Sementara itu, realisasi pembiayaan sebesar Rp146.690.767.646,19 melampaui target sebesar Rp97.509.406.446,00, dengan penerimaan pembiayaan sebesar Rp156.690.767.646,19 dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp10.000.000.000,00

Efektivitas Pendapatan Daerah

Menurut Halim (2007) rasio efektivitas dihitung dengan menggunakan rumus berikut:

$$Rasio\ Efektivitas = \frac{Realisasi\ Penerimaan\ PAD}{Target\ Penerimaan\ PAD} \times 100\%$$

Tabel 4
Nilai Efektif PAD Secara Umum

Kategori	Predikat
Sangat efektif	> 100%
Efektif	90%-100%
Cukup efektif	80%-90%
Kurang efektif	60%-80%
Tidak efektif	< 60%

Sumber: Mahsun (2009)

Tabel 5
Perhitungan Rasio Efektivitas

Tahun	Realisasi Penerimaan Pendapatan	Target Penerimaan	Presentase	Kemampuan
2021	8.326.878.076.226,29	8.675.008.247.134,00	96%	Efektif
2022	8.791.308.679.482,20	9.822.403.087.674,00	90%	Efektif
2023	9.604.779.764.405,37	10.723.824.846.149,00	90%	Efektif

Sumber: Hasil Olahan Peneliti

Berdasarkan analisis Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Surabaya tahun 2021-2023, efektivitas pendapatan daerah berada pada kategori efektif, dengan capaian realisasi terhadap target yang konsisten berada di atas 90%. Pada tahun 2021, capaian efektivitas mencapai 96%, menurun menjadi 90% pada tahun 2022 dan tetap berada di angka 90% pada tahun 2023. Penurunan ini berkorelasi dengan peningkatan target yang tidak diimbangi oleh pertumbuhan kapasitas penerimaan. Meskipun demikian, capaian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Surabaya mampu menjaga performa penerimaan daerah, terutama melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan transfer dari pemerintah pusat.

Faktor pendukung efektivitas ini mencakup kebijakan pelonggaran mobilitas pascapandemi, insentif fiskal, serta digitalisasi sistem pajak melalui SIMPAD. Di sisi lain, tantangan masih muncul dalam bentuk rendahnya kepatuhan wajib pajak, belum optimalnya pengawasan lapangan, serta tekanan ekonomi global yang memengaruhi daya beli masyarakat. Upaya seperti pemutihan pajak dan edukasi publik dilakukan untuk mengatasi tantangan ini. Pemerintah juga mengintegrasikan rencana belanja OPD melalui Development

Plan yang disusun bersama Bappeko guna menjaga kesinambungan antara alokasi dan pencapaian program pembangunan.

Efisiensi Belanja Daerah

Menurut Mahmudi (2007) rasio efektivitas dihitung dengan menggunakan rumus berikut:

$$\text{Rasio Efisien Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Tabel 6
Kriteria Tingkat Efisien
Belanja Daerah Secara Umum

Kategori	Predikat
Sangat efisien	< 60%
Efisien	60%-80%
Cukup efisien	80%-90%
Kurang efisien	90%-100%
Tidak efisien	> 100%

Sumber: Mahsun (2009)

Tabel 7
Rasio Efisiensi

Tahun	Realisasi Belanja Daerah	Anggaran Belanja Daerah	Presentase	Kemampuan
2021	8.326.878.076.226,29	8.981.620.825.377,00	93%	Kurang Efisien
2022	9.448.236.778.683,50	10.636.827.593.321,00	89%	Cukup Efisien
2023	9.543.590.902.934,50	10.821.334.252.595,00	88%	Cukup Efisien

Sumber: Hasil Olahan Peneliti

Tingkat efisiensi belanja daerah dianalisis berdasarkan rasio realisasi terhadap anggaran belanja. Pada tahun 2021, efisiensi tercatat sebesar 93%, menurun menjadi 89% di 2022, dan 88% pada 2023. Berdasarkan kriteria umum, efisiensi ini termasuk dalam kategori cukup efisien. Namun, tren penurunan menunjukkan potensi inefisiensi yang perlu diperbaiki. Penyebab utama berasal dari keterlambatan penyerapan anggaran akibat kompleksitas prosedur dana transfer, keterbatasan kas daerah, serta kegagalan pengadaan barang/jasa karena hambatan teknis.

Kebijakan refocusing akibat pandemi pada 2021 juga berdampak pada rendahnya serapan anggaran. Meskipun kondisi membaik pada tahun-tahun berikutnya, penyesuaian belum berjalan maksimal. Penerapan sistem anggaran berbasis kinerja telah dilakukan melalui Bappeko dengan memperhatikan keterkaitan antara anggaran dan indikator kinerja. Namun, pelaksanaan program masih sering terganggu oleh faktor administratif dan teknis yang berulang.

Strategi dan Upaya Pemerintah

Pemerintah Kota Surabaya telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) seperti ketepatan waktu pelaporan keuangan dan perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebagai tolok ukur efektivitas tata kelola keuangan. Strategi penguatan dilakukan melalui integrasi sistem digital seperti SIMPAD, Kantorku, dan Wargaku, serta penguatan koordinasi antar-OPD dan peningkatan kualitas perencanaan berbasis DevPlan. Selain itu, berbagai kanal

pengaduan publik seperti SMS, WhatsApp, dan Laporan Warga menjadi bagian dari pengawasan partisipatif, memperkuat sistem pengendalian intern untuk mencegah penyalahgunaan dana publik.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Surabaya tahun 2021 hingga 2023, dapat disimpulkan bahwa tingkat efisiensi belanja berada dalam kategori *cukup efisien* berdasarkan kriteria umum (80%–90%). Hal ini menunjukkan bahwa pengeluaran daerah sebagian besar telah dikelola secara hemat dan terkontrol. Namun, keberadaan sisa anggaran yang cukup besar setiap tahunnya menjadi indikasi adanya inefisiensi, baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan, maupun kendala administratif seperti mekanisme penyaluran dana transfer, keterbatasan kas, serta hambatan dalam pengadaan barang dan jasa. Fakta ini menunjukkan perlunya perbaikan sistemik untuk mencegah pemborosan anggaran serta meningkatkan serapan belanja secara merata sepanjang tahun anggaran.

Dari sisi pendapatan, Pemerintah Kota Surabaya berhasil mempertahankan tingkat efektivitas yang tinggi dengan capaian di atas 90% selama periode penelitian. Capaian ini mencerminkan kemampuan daerah dalam merealisasikan target pendapatan secara relatif konsisten, khususnya dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan transfer pusat. Meski demikian, tren penurunan realisasi terhadap target menunjukkan bahwa peningkatan target belum diikuti dengan peningkatan kapasitas penerimaan yang memadai. Ketidakseimbangan ini dapat membatasi ruang fiskal pemerintah daerah dalam membiayai program prioritas.

Selain itu, efektivitas belanja juga dipengaruhi oleh ketepatan perencanaan dan akuntabilitas pengelolaan anggaran. Penggunaan indikator seperti opini WTP dan ketepatan waktu pelaporan menjadi tolok ukur keberhasilan formal, namun belum sepenuhnya menggambarkan efektivitas substansial dalam pencapaian tujuan pembangunan. Upaya integrasi antara rencana belanja masing-masing OPD dan dokumen perencanaan pembangunan (Development Plan) oleh Bappeda merupakan langkah strategis untuk memperkuat sinergi dan arah kebijakan fiskal ke depan. Oleh karena itu, meskipun kinerja pengelolaan anggaran Kota Surabaya tergolong baik, masih terdapat ruang perbaikan yang signifikan agar efisiensi dan efektivitas dapat dicapai secara optimal dan berkelanjutan.

Saran

Berdasarkan hasil dan kesimpulan yang telah disusun diatas, maka saran yang dapat diajukan oleh peneliti, sebagai berikut: **(1)** Bagi Pemerintah Kota Surabaya pemerintah Kota Surabaya perlu meningkatkan ketepatan waktu realisasi dana transfer melalui pemenuhan persyaratan administratif dan penguatan koordinasi antar-OPD. Perencanaan kas yang lebih matang, disertai penetapan prioritas belanja yang terstruktur, penting untuk mengatasi keterbatasan kas daerah. Evaluasi mendalam terhadap proses pengadaan juga diperlukan guna mencegah kegagalan lelang yang berdampak pada efisiensi anggaran. Di sisi pendapatan, meskipun tergolong efektif, penurunan persentase capaian menunjukkan perlunya inovasi dalam menggali sumber PAD baru serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Program edukasi dan pemutihan pajak dapat menjadi alternatif untuk memperluas basis penerimaan daerah. **(2)** Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menggunakan periode waktu yang lebih panjang dan membandingkan kinerja anggaran antarwilayah. Selain itu, analisis sebaiknya mencakup indikator output dan outcome program guna memperoleh gambaran menyeluruh tentang efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

DAFTAR PUSTAKA

Bastian, I. 2010. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Edisi Ketiga. Erlangga. Jakarta.

- Fadilah, S. 2009. Activity Based Costing (ABC) sebagai Pendekatan Baru Untuk Menghitung Analisis Standar Belanja (ASB) dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). *Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi*, Vol.2, No 1, p.54– 78.
- Gunawan, D.R. 2016. Penerapan Sistem E-Budgeting Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Publik (Studi pada Pemerintah Kota Surabaya). *AKRUAL Jurnal Akuntansi*, 8(1), p. 72.
- Halim, A. 2002. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah Edisi Pertama*. Salemba Empat. Jakarta.
- Halim, A. 2014. *Manajemen Keuangan Sektor Publik Problematika Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah)*. Salemba Empat. Jakarta.
- Halim, A. and Kusufi, M.S. 2016. *Teori, Konsep dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat. Jakarta.
- Harahap, S.S. 2000. *Budgetting-Penganggaran Perencanaan Lengkap untuk Membantu Manajemen Cetakan II*. Grafindo. Jakarta
- Mamesah, A.M.C., Kawet, L. Lengkong, V.P.K. 2016. Pengaruh Lingkungan Kerja, Disiplin Kerja, dan Loyalitas Kerja Terhadap Kinerja Karyawan pada LPP RRI Manado, *Jurnal EMBA, Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, Vol.4, No 3.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2004. *Public Sector Accounting*. Andi Offset. Yogyakarta.
- Moleong, J.L. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Nafarin, M. 2004. *Penganggaran Perusahaan*. Salemba Empat. Jakarta
- Soleh, C. dan Rochmansjah, H. 2012. *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah*. Fokusmedia. Bandung.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Sugiyono. 2017. *Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D*. CV. Alfabeta. Bandung.
- Sujarweni, V.W. 2015. *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*. Pustaka Baru Press. Yogyakarta.
- Suwarni, D.E. and Ma'arif, M.F. 2018. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keterlambatan Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kota Surabaya (Studi pada SKPD Dinas PU Bina Marga dan Pematusan). *Jurnal Publika*, Vol. 6, No. 5.
- Usman, H. and Akbar, P.S. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Rusdi. 2018. Analisis Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang.
- Peraturan Walikota Nomor 089 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Surabaya.
- Mahsun. 2009. Pengukuran Kinerja Sektor Publik. BPFE. Yogyakarta.
- Mahmudi. 2010. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. UPP STIM YKPN. Yogyakarta
- Mahmudi. 2007. Manajemen Kinerja Sektor Publik. UPP STIM YKPN. Yogyakarta